



PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM  
MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Fatwa Eliza<sup>1</sup>, Fahrianoor<sup>2</sup>

Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: [fatwaeliza84@gmail.com](mailto:fatwaeliza84@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam keberlanjutan demokrasi lokal, namun masih menghadapi keterbatasan pengetahuan politik, pengalaman, serta rendahnya literasi demokrasi. Kondisi tersebut menuntut adanya intervensi Pemerintah Daerah melalui kebijakan dan program pendidikan politik yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran demokrasi dan kualitas partisipasi politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sekaligus mengidentifikasi penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan berbagai program pendidikan politik dan kerjasama lintas sektor dengan lembaga pendidikan dan penyelenggara Pemilu. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya, keterbatasan infrastruktur dan akses lokasi, keterbatasan waktu pelaksana, faktor sosial dan budaya, serta kurangnya media dan materi yang menarik, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap signifikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula. Pendidikan politik yang berkesinambungan dan inovatif berpotensi membentuk pemilih yang kritis, berintegritas, dan memiliki kesadaran demokrasi tinggi.

Kesimpulannya, penguatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi elemen strategis dalam mendorong konsolidasi demokrasi lokal serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Kata Kunci :** Pendidikan politik, Pemilih pemula, Pilkada 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Partisipasi politik, Demokrasi lokal, Kualitatif

**ABSTRACT**

*This study examines the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik of Hulu Sungai Tengah Regency in strengthening political education for first-time voters during the 2024 Regional Head Election. First-time voters represent a strategic group in sustaining local democracy, yet they continue to face limitations in political knowledge, experience, and democratic literacy. These conditions demand intervention from the local government through well-planned, systematic, and continuous political education policies and programs.*

*The purpose of this research is to analyze the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik in designing and implementing political education programs for first-time voters, as well as to assess their effectiveness in raising democratic awareness and improving the quality of political participation.*



*The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Data were analyzed using descriptive-analytical methods to illustrate the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik while also identifying obstacles in the implementation of political education.*

*The findings reveal that the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik of Hulu Sungai Tengah Regency has carried out various political education programs and cross-sector collaborations with educational institutions and election organizers. Despite challenges such as limited budget, human resources, infrastructure, and accessibility, as well as time constraints, socio-cultural factors, and the lack of engaging media and materials, the Agency's role remains significant in enhancing the quality of political participation among first-time voters. Continuous and innovative political education has the potential to shape voters who are critical, have integrity, and possess strong democratic awareness.*

*In conclusion, strengthening the role of the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik is a strategic element in promoting local democratic consolidation and improving the quality of regional governance in Hulu Sungai Tengah Regency.*

**Keywords:** Political education, First-time voters, 2024 Regional Election, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Political participation, Local democracy, Qualitative

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem demokrasi, rakyat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan politik, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satu manifestasi nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi elektoral. Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral formal, tetapi juga sebagai instrumen demokratis yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan lokal.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (8), yang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pada bulan November 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak ini diharapkan mampu memperkuat sistem demokrasi lokal serta meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan serius yang berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif di tingkat lokal. Sejumlah permasalahan yang kerap muncul di antaranya adalah praktik politik transaksional, ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan aparatur birokrasi, dominasi elite lokal, maraknya politik uang, serta munculnya konflik sosial. Fenomena-fenomena tersebut mencerminkan lemahnya integritas institusional dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga menuntut adanya



perbaikan tata kelola politik lokal yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Demokrasi sejatinya tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pemilu atau mekanisme suara mayoritas, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu. Kritik terhadap praktik demokrasi prosedural di Indonesia juga disampaikan oleh Titi Anggraini yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada taraf prosedural, di mana sistem politik lebih menitikberatkan pada pemilu dan partai sebagai instrumen kekuasaan, namun mengabaikan substansi demokrasi yang lebih mendalam. Sistem pemilu serentak dinilai cenderung memungkinkan politik gagasan dan justru memperkuat praktik politik uang, sehingga berdampak pada lemahnya budaya hukum dan kualitas demokrasi.

Sistem politik yang sehat dan mekanisme rekrutmen politik yang transparan memiliki kontribusi penting dalam membentuk pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pilkada bukan sekadar arena kontestasi elektoral, melainkan juga cerminan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Lebih jauh, sistem politik memiliki peran strategis dalam menentukan arah kehidupan generasi muda, baik melalui kebijakan publik yang dihasilkan maupun melalui proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi politik.

Dalam era digital saat ini, peran generasi muda dalam dinamika politik menjadi semakin signifikan. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilaksanakan pada Desember 2023 hingga Januari 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% atau sekitar 221,5 juta jiwa. Generasi Z tercatat sebagai kelompok dengan tingkat penetrasi internet tertinggi, yaitu sebesar 87,02%, dan menyumbang 34,4% dari total pengguna internet nasional. Data ini menunjukkan bahwa pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas merupakan kelompok yang sangat intensif berinteraksi dengan dunia digital dan arus informasi yang cepat serta dinamis.

Kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, generasi muda memiliki akses luas terhadap informasi politik dan sosial, namun di sisi lain mereka juga rentan terhadap paparan informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi sangat penting sebagai upaya membekali pelajar dengan kemampuan literasi politik yang memadai.

Pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman mengenai sistem pemerintahan atau partai politik, tetapi juga mencakup internalisasi nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan pendidikan politik yang memadai, pelajar diharapkan mampu berpikir kritis, menilai kebijakan publik secara rasional, serta berpartisipasi aktif dalam Pilkada secara bertanggung jawab.

Urgensi pendidikan politik bagi pelajar semakin menguat mengingat posisi mereka sebagai pemilih pemula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 34, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin. Pemilih pemula yang umumnya berada pada rentang usia 17–21 tahun memiliki potensi elektoral yang besar dalam menentukan arah demokrasi ke depan.

Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kelompok Generasi Z menyumbang 43,792% dari total DPT, dengan 11,21% di antaranya merupakan pemilih pemula. Data ini menegaskan bahwa pemilih pemula



memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat partisipasi politik serta kualitas demokrasi elektoral di daerah.

Pelajar sebagai bagian dari pemilih pemula berada pada fase perkembangan psikososial yang ditandai dengan pencarian identitas dan tingginya rasa ingin tahu terhadap lingkungan sosial dan politik. Kondisi ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang potensial sekaligus rentan terhadap pengaruh politik praktis. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif yang sistematis melalui pendidikan politik, pendampingan, serta penyediaan informasi yang akurat dan berimbang agar pelajar mampu menentukan pilihan politik secara bijak dan bertanggung jawab.

Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, pendidikan politik menjadi instrumen strategis dalam membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Pendidikan politik perlu mencakup pemahaman mengenai prosedur kepemiluan, mekanisme DPT, penilaian rekam jejak calon, pemahaman isu-isu politik lokal, serta kesadaran terhadap peran media sosial dalam membentuk opini publik dan potensi disinformasi. Dengan literasi politik yang baik, pemilih pemula diharapkan mampu berpartisipasi secara sadar dan independen, serta terhindar dari praktik politik uang dan manipulasi politik.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilih. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan politik, khususnya bagi pemilih pemula, guna mendorong terselenggaranya Pilkada yang berintegritas, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

## METODE

### Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula serta dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi politik menjelang Pilkada serentak tahun 2024.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma postpositivisme atau interpretif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengungkap makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi secara alamiah (Sugiyono, 2022). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi variabel.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pelaksana utama kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2024, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

### Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik serta pemilih pemula sebagai sasaran kegiatan. Informan penelitian meliputi pimpinan dan pegawai Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta pemilih pemula yang berasal dari kalangan mahasiswa.



Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, antara lain peraturan perundang-undangan terkait Pilkada dan pendidikan politik, keputusan Komisi Pemilihan Umum, laporan kegiatan, serta artikel dari media cetak dan daring yang relevan dengan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam dan fleksibel terkait pelaksanaan serta dampak sosialisasi pendidikan politik. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara melalui bukti tertulis maupun visual.

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh.

### Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan.

## PEMBAHASAN

### Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ketahanan ideologi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bakesbangpol memegang peran strategis dalam meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol dalam pendidikan politik pemilih pemula tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan operasional. Melalui berbagai kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, Bakesbangpol berupaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap hak dan kewajiban politik, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi politik, serta membentuk sikap kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik, termasuk menolak praktik politik uang dan penyebarluasan informasi hoaks.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran Bakesbangpol telah sejalan dengan tujuan khusus penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peran Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula pada Pilkada Tahun 2024.

### Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Politik

Salah satu peran utama Bakesbangpol dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula adalah melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan politik secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga bentuk utama kegiatan pendidikan politik yang telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi pendidikan politik, pemasangan spanduk, dan pemanfaatan media sosial.

#### 1. Sosialisasi Pendidikan Politik

Kegiatan sosialisasi pendidikan politik merupakan program utama yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada Tahun 2024, kegiatan

sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan sebanyak 12 kali dengan jumlah peserta sebanyak 1.400 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.235 peserta merupakan pemilih pemula, sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran utama program ini adalah generasi muda yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali.

Sosialisasi dilaksanakan dengan metode ceramah, simulasi, diskusi, serta tanya jawab. Kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap proses Pilkada, pentingnya partisipasi politik, serta membangun kesadaran kritis dalam menggunakan hak pilih. Tingginya keterlibatan pemilih pemula dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik telah berjalan efektif dalam menjangkau kelompok sasaran.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Mardiyono, S.Pd, yang menyatakan bahwa Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam memberikan edukasi politik kepada generasi muda, khususnya pemilih pemula, agar menjadi pemilih cerdas yang tidak terpengaruh oleh isu hoaks dan praktik politik uang.

### a. Lokasi Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan di berbagai lokasi strategis, seperti sekolah menengah atas (SMA/SMK/MAN), aula Bapelitbangda, Pendopo Bupati, serta Rutan Klas II B Barabai. Pemilihan lokasi tersebut menunjukkan bahwa Bakesbangpol berupaya menjangkau pemilih pemula dari berbagai latar belakang, baik pelajar, mahasiswa, maupun warga binaan.

Pelaksanaan program “Pendidikan Politik Goes to School” menjadi bukti konkret bahwa Bakesbangpol memfokuskan pendidikan politik pada pemilih pemula di lingkungan pendidikan formal. Hal ini memperkuat peran Bakesbangpol dalam mendekatkan pendidikan politik kepada generasi muda secara langsung dan kontekstual.

### b. Materi dan Metode

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pendidikan politik meliputi hak dan kewajiban warga negara, sistem demokrasi, mekanisme Pilkada, serta ajakan untuk menolak praktik politik uang dan hoaks. Materi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pemilu, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang sehat dan berintegritas.

Metode pelaksanaan yang digunakan, seperti ceramah, simulasi, diskusi, dan tanya jawab, mencerminkan upaya Bakesbangpol untuk menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif. Pendekatan edukatif-rekreatif (edutainment) yang diterapkan bertujuan agar materi mudah dipahami dan menarik bagi pemilih pemula.

### c. Narasumber

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan sosialisasi berasal dari berbagai unsur, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur pemerintah daerah, serta tokoh agama. Kehadiran narasumber yang beragam memberikan perspektif yang komprehensif kepada pemilih pemula, baik dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, pengawasan, maupun nilai-nilai moral dan etika dalam berpolitik.

### d. Sumber Dana

Sumber pendanaan kegiatan pendidikan politik berasal dari Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bakesbangpol Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 366.970.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik serta pembuatan alat peraga seperti spanduk.



## 2. Pemasangan Spanduk

Selain sosialisasi langsung, Bakesbangpol juga melaksanakan pendidikan politik melalui pemasangan spanduk imbauan di kantor-kantor kecamatan. Spanduk tersebut berisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan berpartisipasi aktif dalam Pilkada Tahun 2024. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana pendidikan politik pasif yang menjangkau masyarakat secara lebih luas.

## 3. Pemanfaatan Media Sosial

Pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan kanal YouTube menjadi bentuk lain dari program pendidikan politik yang direncanakan oleh Bakesbangpol. Media ini digunakan untuk menyebarluaskan informasi kegiatan, pesan-pesan pendidikan politik, serta dokumentasi kegiatan sosialisasi. Penggunaan media sosial menunjukkan adanya upaya penyesuaian strategi pendidikan politik dengan karakteristik pemilih pemula yang akrab dengan teknologi digital.

## Melakukan Kerja Sama Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol tidak melaksanakan pendidikan politik secara mandiri, melainkan melalui kerja sama kelembagaan dengan sekolah, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan tokoh agama. Kerja sama ini bertujuan menciptakan sinergi dalam penyampaian pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kerja sama dengan sekolah menjadi strategi utama dalam menjangkau pemilih pemula. Sekolah berperan sebagai ruang pembelajaran formal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dulu. Selain itu, kerja sama dengan KPU memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pemilu, sedangkan kerja sama dengan Bawaslu menekankan aspek pengawasan partisipatif dan penolakan terhadap praktik politik uang.

Sinergi kelembagaan ini menunjukkan bahwa bentuk program pendidikan politik yang direncanakan oleh Bakesbangpol telah disusun secara kolaboratif dan terstruktur, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

## Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Politik

Hasil penelitian juga mengungkap adanya sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik pemilih pemula, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, waktu pelaksanaan, faktor sosial dan budaya, serta kurangnya media dan materi yang menarik. Faktor-faktor tersebut memengaruhi jangkauan, kualitas, dan efektivitas program pendidikan politik yang telah direncanakan.

Meskipun demikian, keberadaan faktor penghambat ini tidak menghilangkan peran dan upaya Bakesbangpol dalam meningkatkan pendidikan politik pemilih pemula, melainkan menjadi bagian penting dalam analisis untuk perbaikan program di masa mendatang.

## SIMPULAN

Pendidikan pendidikan bagi pemilih pemula yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol telah memfasilitasi informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami terbukti menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik generasi muda. Kejelasan informasi yang disampaikan tidak hanya membantu pemilih pemula memahami mekanisme pemilu dan hak serta kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga berperan dalam membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat strategis, khususnya melalui pemanfaatan digitalisasi sebagai sarana sosialisasi yang mampu menjangkau pemilih pemula secara lebih luas, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.



Meskipun sosialisasi berbasis digital memiliki efektivitas yang tinggi, pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara langsung ke lapangan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah direncanakan tetap memiliki urgensi tersendiri. Pendekatan tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intensif antara penyelenggara dan pemilih pemula, sehingga proses penyampaian materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Kegiatan turun langsung ke lapangan juga menjadi sarana untuk memastikan pemerataan akses informasi, terutama bagi pemilih pemula yang berada di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur digital.

Penyampaian edukasi politik yang disederhanakan dan dikaitkan dengan isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan ketertarikan pemilih pemula terhadap politik. Pendekatan ini memungkinkan pemilih pemula untuk tidak hanya memahami konsep-konsep dasar politik dan demokrasi, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai partisipasi, tanggung jawab, dan rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, sosialisasi tidak berhenti pada aspek kognitif, melainkan turut membentuk sikap dan orientasi politik yang lebih matang.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pilkada, serta tokoh agama memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Peran masing-masing unsur tersebut penting dalam memberikan perspektif yang komprehensif, khususnya terkait pemahaman fungsi dan peran institusi negara, pentingnya menjaga netralitas serta penguatan kesadaran akan partisipasi politik yang bertanggung jawab. Sinergi multipihak ini juga memperluas ruang komunikasi dan interaksi, sehingga proses sosialisasi menjadi lebih inklusif dan partisipatif.

Seluruh rangkaian sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada norma dan prinsip konstitusional, menjunjung tinggi sikap netral, tidak memihak kepada partai politik maupun calon tertentu, serta mengedepankan profesionalitas dalam penyampaian materi. Independensi dan objektivitas dalam sosialisasi merupakan prasyarat utama dalam menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa pendidikan pemilih benar-benar berorientasi pada penguatan demokrasi, bukan pada kepentingan politik praktis.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan terhadap seluruh kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula menjadi instrumen penting dalam menjamin efektivitas program. Melalui evaluasi yang terukur, kelemahan dan kelebihan pelaksanaan sosialisasi dapat diidentifikasi secara objektif, sehingga menjadi dasar bagi perbaikan strategi, metode, dan materi di masa mendatang. Dengan demikian, sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam membentuk generasi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan berkomitmen terhadap keberlanjutan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Hasyim, S.S.A. (2023) ‘Pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2024’, *Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Affandi, I. (2021) *Pendidikan politik, kepemimpinan dan kepeloporan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ariyanto, F.I. (2023) *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula guna menyambut Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Jombang*. Tersedia di: <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14780> (Diakses: 2025).
- Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (2015) *Buku pedoman pendidikan pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Basuki, J. (2018) *Administrasi publik: Telaah teoretis dan empiris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008) *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Endhita, P.P., Novita, R., Wildan, V.J. dan Yunita, S. (2023) ‘Pengkajian ulang pondasi pendidikan politik untuk pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan’, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Firmansyah, N.A. (2018) ‘Pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ikhsan, M. (2022) *Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Kota Pekanbaru*. Tersedia di: <http://eprints.ipdn.ac.id/9947/1/project%20sane.pdf> (Diakses: 2025).
- Indradi, S.S. (2016) *Dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Kartono, K. (2009) *Pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*. Bandung.
- Kristian, Y. (2022) *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas politik di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*. Tersedia di: <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/11476> (Diakses: 2025).
- Leodina, M.I.D.A., Irawaty, T. dan Wulandari, W. (2024) ‘Peran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat pada pemilu dan pemilihan serentak’, *Jurnal Pemerintahan*, 1(1). Tersedia di: <https://doi.org/10.36859/jp.v1i1.2550>
- Maksudi, B.I. (2019) *Dasar-dasar administrasi publik: Dari klasik ke kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Moay, A.J. (2024) *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan*. Tersedia di: <http://eprints.ipdn.ac.id/19778/1/Sandro%20Ringkasan%20Skripsi%20fiks.pdf> (Diakses: 2025).
- Nurfitriana, Yusuf, M. dan Berlian, O. (2021) ‘Efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin’, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pasolong, H. (2022) *Teori administrasi publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rahmiyati, M., Reza, M. dan Latuda, F. (2023) ‘Pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik’, *Jurnal Governance and Politics (JGP)*.
- Ranjabar, J. (2019) *Sistem politik Indonesia: Sistem politik, demokrasi dan pendidikan politik*. Bandung: Alfabeta.



- Riyadi, A. (2002) *Sosiologi*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Sarwono, S.W. (2015) *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2009) *Peranan sosiologi: Suatu pengantar*. Edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugianto (2018) *Ilmu negara: Sebuah kajian dalam perspektif teori kenegaraan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono (2022) *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, A.K. (2022) *Pendidikan politik: Studi partai politik dalam membumikan Pancasila*. Malang: Endnote Press.